



Media Title	Kompas		
Head Line	Menanti Peraturan Presiden		
Date	25 Jan 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	17	Article Size	
Journalist	M Clara Westi	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Menanti Peraturan Presiden

Kinginan pemerintah memajukan perekonomian Indonesia telah dituangkan di Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Cita-citanya, Indonesia akan masuk dalam kategori negara maju pada tahun 2025.

Untuk mencapai cita-cita itu, pemerintah telah menetapkan enam koridor pembangunan, yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dari keenam koridor itu, Jawa mempunyai peran yang paling besar terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni 58,8 persen pada tahun 2007 dan 57,63 persen pada tahun 2012. Sumatera menyumbang PDB sebesar 22,90 persen pada tahun 2007 dan 23,77 persen pada tahun 2012. Sumbangan empat koridor lainnya masih berkisar 2-9 persen saja terhadap PDB.

Namun, perlu dicermati, sumbangan Jawa terhadap PDB ternyata turun. Sumbangan Sumatera meningkat. Dengan kondisi ini, pemerintah seharusnya waspada. Mendorong pertumbuhan di Jawa agak sulit karena pertumbuhan membutuhkan pembangunan. Sementara penduduk di Jawa sudah terlalu padat sehingga sulit untuk membangun.

Peluang pertumbuhan sebenarnya ada di Sumatera. Namun, untuk menjadi pendorong pertumbuhan, Sumatera membutuhkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu akan mendorong pertumbuhan di sekitarnya karena menciptakan lapangan kerja dan potensi-potensi ekonomi baru.

Infrastruktur yang dibutuhkan adalah pelabuhan, energi, dan jalan atau rel kereta api. Pelabuhan dan energi sudah mulai dikerjakan pemerintah. Pelayanan beberapa pelabuhan juga sudah meningkat.

Yang belum disentuh adalah jalan atau rel. Pemerintah sebenarnya sudah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) membangun Jalan Tol Trans-Sumatera untuk membangun itu. Alasan pembangunan jalan tol karena jika dibangun jalan arteri, pemerintah harus mengucurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus-menerus untuk perawatannya. Jika jalan tol, jalan tersebut membiayai sendiri perawatannya. Jalan tol juga dipilih karena akan menjadi pendorong pertumbuhan di semua kawasan yang dilintasinya.

Rel kereta api hanya akan mendorong pertumbuhan di sekitar stasiun. Dalam pembangunan jalan tol juga bisa sekalian dibangun infrastruktur lain, seperti pipa gas dan jalur serat optik.

Ternyata walau sudah ditetapkan jalan tol, prosesnya juga tidak lancar. Modal untuk membangun jalan tol sepanjang 2.608 kilometer dari Aceh hingga Lampung itu diperkirakan sebesar Rp 350 triliun. PT Hutama Karya membutuhkan penyertaan modal dari pemerintah sebesar 30 persen atau sekitar Rp 70 triliun. Modal ini akan menjadi saham, bukan pemberian gratis, dan penyeterannya dilakukan secara bertahap.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengizinkan skema ini, tetapi dengan syarat harus ada peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum. DPR juga telah mengalokasikan anggaran pembangunan jalan tol ini sebesar Rp 2 triliun pada APBN Perubahan tahun 2013. Namun, hingga kini perpres itu tidak kunjung keluar. Akibatnya, anggaran ini masuk ke dalam Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 2013.

Tahun 2014, DPR kembali mengalokasikan Rp 5,1 triliun untuk proyek ini. Namun, pencairannya tetap dengan syarat ada payung hukum penugasan berupa perpres.

Hingga kini perpres belum juga dikeluarkan. Padahal, jika perpres terbit, pembangunan bisa segera dilakukan. Bahkan, jika pembangunan dimulai tahun 2014, jalan tol sudah siap tahun 2025 secara keseluruhan. Jika infrastruktur siap, investor pun akan berdatangan. Ekonomi akan tumbuh dan cita-cita menjadi negara maju akan terwujud. Kuncinya satu, yaitu perpres. (M CLARA WREST)